

# **PENGARUH PENYAJIAN NERACA DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH**

**Sukhemi**

## *Abstract*

*The research aims at analyzing the impact of district balance-sheet presentation towards the accountability of district finance. This research used linear regression model.*

*In collecting data, this empirical research used quota sampling technique. The data are collected by using 200 questionnaires that spread to many stakeholders of district finance report such as legislators, public servant, lecturer, and labors with range of return about 58,5%. Data was analyzed by using linear regression with program SPSS version 16.*

*The research result shown that presentation of district balance sheet positively influence toward accountability in district finance.*

*Key words: Presentation of district balance sheet, accountability.*

## **Latar Belakang**

Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum, dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Sumarlin (2004) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggara negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah juga yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Drebin et al (1981) dalam Mardiasmo (2004) mengidentifikasi terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) Karyawan/ pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversight bodies*).

Nasution (2008) menegaskan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004 – 2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk. Oleh karena itu diperlukan percepatan perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah-langkah konkrit, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah. Persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2006 semakin menurun setiap tahunnya. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) justru semakin meningkat. Hasil Pemeriksaan atas 459 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 3 LKPD yang memperoleh opini WTP dan masih ada enam LKPD yang belum disampaikan ke BPK RI sampai akhir 2007.

Dwiningsih (2006) meneliti persepsi stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholders terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wisnu (2007) mengatakan Terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholder terhadap kriteria akuntabilitas dan kriteria transparansi keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Mulgan (1997) meneliti mengenai proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Proses akuntabilitas publik ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hal ini dibuktikan dengan saluran untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang dimulai dari

pelayan masyarakat kemudian menuju ke arah menteri, parlemen, pengadilan dan ombudsman baru menuju ke arah masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo,2006).

### **Perumusan Masalah**

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia tentang menguatnya tuntutan akuntabilitas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Kontribusi praktik berupa masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan penyajian neraca daerah dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

### **Kajian Teori**

#### **Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri

dari dua macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Budiardjo (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).

Teori agensi ilmu ekonomi memprediksikan dan menjelaskan perilaku bagian yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Secara hukum seorang agen adalah seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Teori agensi ilmu ekonomi dibangun di atas konsep legal dari agensi. Teori agensi memandang perusahaan sebagai sebuah persimpangan hubungan keagenan dan mencoba memahami perilaku organisasi dengan menguji bagaimana bagian-bagian pada hubungan keagenan dalam perusahaan memaksimalkan manfaat untuk masing-masing. Teori agensi memposisikan konflik antara manajemen dan pemilik dapat diredakan dengan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang rutin adalah satu cara pemilik memonitor kontraknya dengan manajemen (Wolk, 2004).

Menurut Wisnu (2007) persepsi adanya akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Laporan keuangan daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana baik dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari masyarakat.
2. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah (yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas serta penjelasan atas laporan keuangan tersebut).
3. Laporan keuangan yang dibuat disajikan secara tepat waktu.

4. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa (auditor) yang independent yaitu BPK (badan pemeriksa keuangan) guna memastikan bahwa laporan tersebut dibuat dan disajikan secara baik dan benar (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
5. Pemerintah Daerah merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut Standar akuntansi Pemerintahan dalam Mahsun dkk (2007) adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran, yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
2. Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
5. Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.
6. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

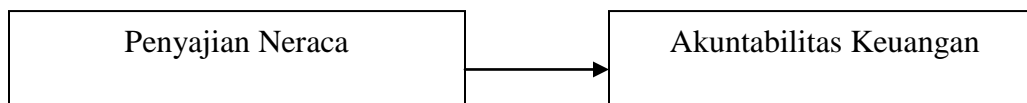
## Penyajian Neraca

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2004)

Hakim dan Halim (2008) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas di sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Mulyono (2006) menyatakan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

## Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat menyajikan laporan keuangan kepada *stakeholder* untuk menyampaikan pengelolaan keuangan dalam periode tertentu yang bersumber dari dana masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka model dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :



Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut: "Penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah".

## **Variabel Penelitian**

Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu:

1. Penyajian Neraca (X)
2. Akuntabilitas Keuangan (Y)

## **Metode Penelitian**

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2004), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian populasi adalah orang yang memiliki informasi yang menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah *stakeholder* laporan keuangan pemerintah antara lain anggota DPRD, guru/dosen, pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *non probabilitas* yaitu *quota sampling*. Menurut Kuncoro (2003), Pengambilan sampel dengan cara ini digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgroup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam *quota sampling*, peneliti menentukan target kuota yang dikehendaki. Target kuota mengacu pada pendapat yang menyatakan bahwa *sample size larger than 30 and less than 500 are appropriate for most research. In multivariate research (including multiple regression analysis), the sample size should be several times (preferable 10 times or more) as large as the number of variable in the study* (Sekaran, 2003).

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data asli. Dan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan variabel yang diteliti yaitu penyajian neraca daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Penyajian Neraca Daerah adalah penyajian laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Penyajian neraca daerah diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan enam pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2006).
2. Akuntabilitas Laporan Keuangan adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2004). diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan lima pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2007).

## Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta X_1 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X<sub>1</sub> = Penyajian Neraca

e = Faktor-faktor lain yang berpengaruh/ variabel pengganggu tak terkendali

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah, dan dilakukan dengan



menggunakan uji t. Hasil penelitian didapatkan nilai t sebesar 2,781 dan nilai p sebesar 0,006. Berdasarkan nilai t yang positif dan nilai  $p < 0,05$ , maka disimpulkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna mempersepsi bahwa akuntabilitas laporan keuangan tergantung dari cara penyajian neraca daerah. Pengguna menganggap bahwa laporan keuangan daerah dianggap akuntabel apabila memberikan informasi secara terintegrasi mengenai posisi asset, utang dan ekuitas dana pmda, serta memberikan informasi mengenai dampak pelaksanaan anggaran.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan daerah dianggap akuntabel apabila memberikan informasi secara terintegrasi mengenai posisi asset, utang dan ekuitas dana pmda, serta memberikan informasi mengenai dampak pelaksanaan anggaran.

### **Keterbatasan dan Saran**

Evaluasi atas penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan dan saran yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini:

1. Penelitian hanya menggunakan stakeholder laporan keuangan daerah di Yogyakarta, sehingga penelitian ini sulit untuk digeneralisasikan untuk semua stakeholder laporan keuangan di Indonesia.
2. Responden divariasikan untuk semua stakeholder laporan keuangan di Indonesia, agar dapat melihat hasil yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi dari penelitian ini, selain kegunaan di bidang akademis, juga diharapkan dapat diimplikasikan pada tataran praktis. Bagi pemerintah daerah , hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan penyajian neraca daerah dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2000. Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat. Mizan, Bandung
- Dwiningsih, S. 2006. Persepsi Stakeholder Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mahsun, M. Sulistiyowati, F. dan Andre Purwanugraha, H. 2007. Akuntansi Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Mei:1-17
- Mulgan, Richard. 1997, The Processes of Public Accountability, *Journal Of Public Administration*.
- Mulyono, B. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Nasution, A. 2008. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, <http://www.bpkp.go.id/>
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Sekaran, U. 2003. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons Inc., New York.
- Sugiyono, 2004. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung
- Sumarlin, 2004. Good Governance Mensyaratkan Pengawasan Internal dan Eksternal, *Seminar Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik*, di Hotel Borobudur, Jakarta, 13 Januari 2004
- Wisnu, H.S., 2007. Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Wolk, H. Dodd, J. and Tearney, M. 2004. Accounting Theory. Sixth Edition, South-Western.